BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud penyelenggraan negara yang bersih dan bebas KKN guna untuk tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance)

Untuk penjabaran lebih lanjut dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibentuklah Dinas Perhubungan yang merupakan salah satu unsur pelaksana. Pemerintah Daerah sebagai pembantu Kepala Daerah. Dinas Perhubungan melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

a. **TUGAS POKOK**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan, yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. **FUNGSI**

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana prasarana, dan lalu lintas.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselam
3. atan sarana prasarana, dan lalu lintas.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, dan lalu lintas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
    1. Seksi Keselamatan.
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
    3. Seksi Pengembangan.
d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

1. Seksi Angkutan.
2. Seksi Lalu Lintas.
3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. **Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

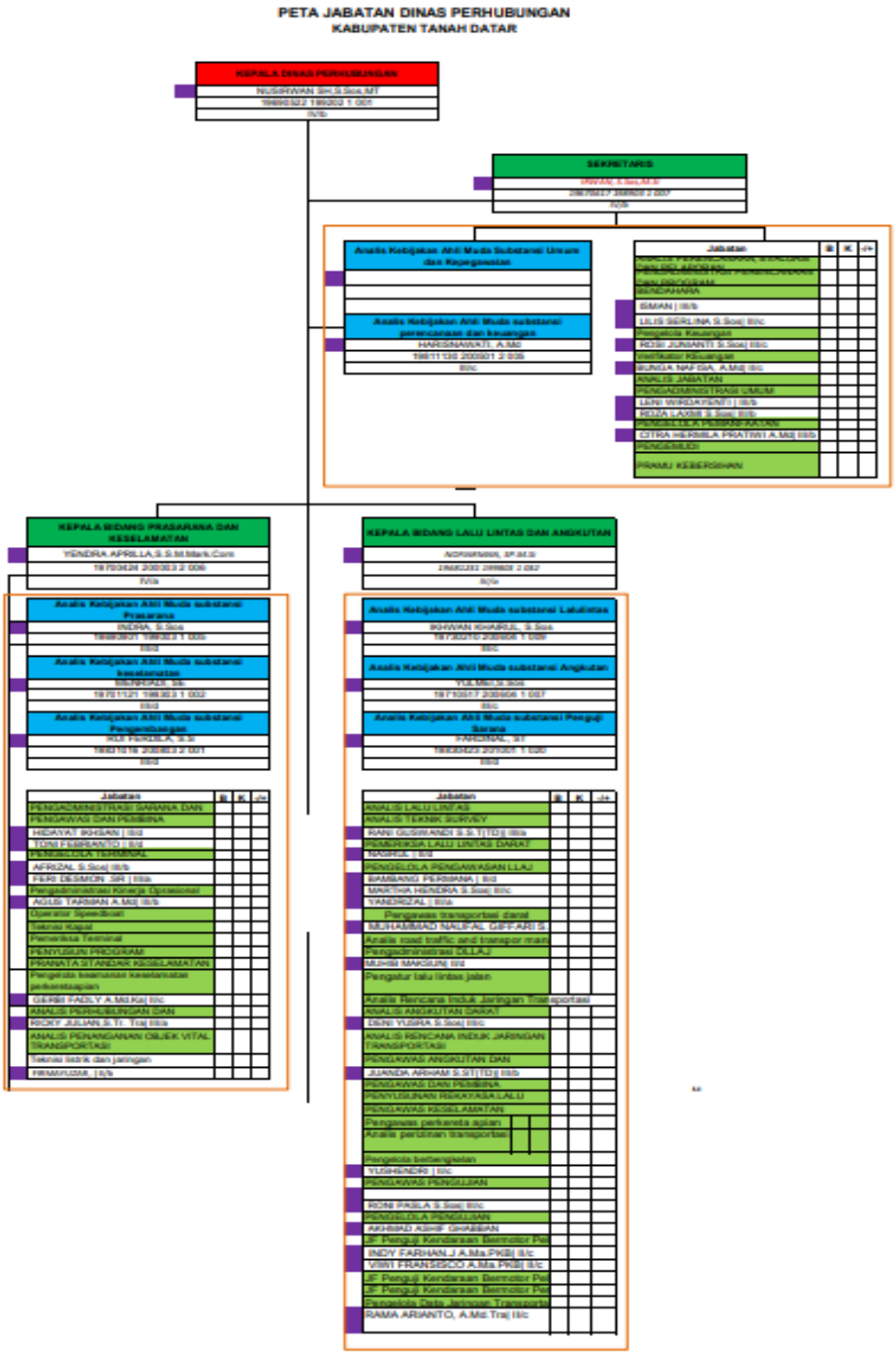

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, dan lalulintas;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perhubungan;

b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang perhubungan;
f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

C. Kabid Lalu Lintas

(1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu lintas;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Lalu Lintas;
c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Lalu Lintas berdasarkan skala prioritas;
d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

D. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana

(1) Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Keselamatan Sarana dan Prasarana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana berdasarkan skala prioritas;
d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal, salah satu yang mempengaruhi adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023, terdapat 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 25 Orang Pegawai Honorer/Kontrak/THL dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.c.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				Tenaga Honor/Kontrak
		IV	III	II	I	
1.	Laki – Laki	4	16	13	0	25
2.	Perempuan	0	10	2	0	0
	Jumlah	4	26	15	0	25

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :

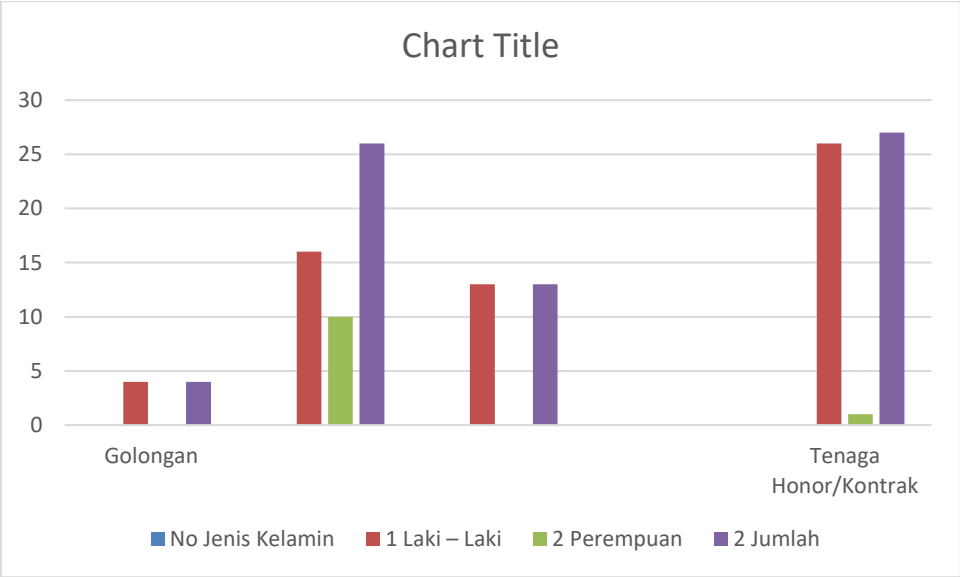

Tabel 1.c.2

Data pegawai berdasarkan pembagian per Bidang.

NO	UNIT KERJA	PNS	HONORER	JUMLAH
1.	Sekretariat	10	5	15
2.	Bidang TKSP	14	17	29
3.	Bidang Lalu Lintas	21	3	27

	Jumlah	45	25	

Tabel 1.c.3

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	NON PNS	JUMLAH
1.	S-2	3	-	3
2.	S-1	25	2	27
3.	D-III	7	-	7
4.	D-II	4	-	4
5.	SMA sederajat	9	6	15
6.	SMP sederajat	-	7	1
7.	SD sederajat	-	10	2
	JUMLAH	45	25	70

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :

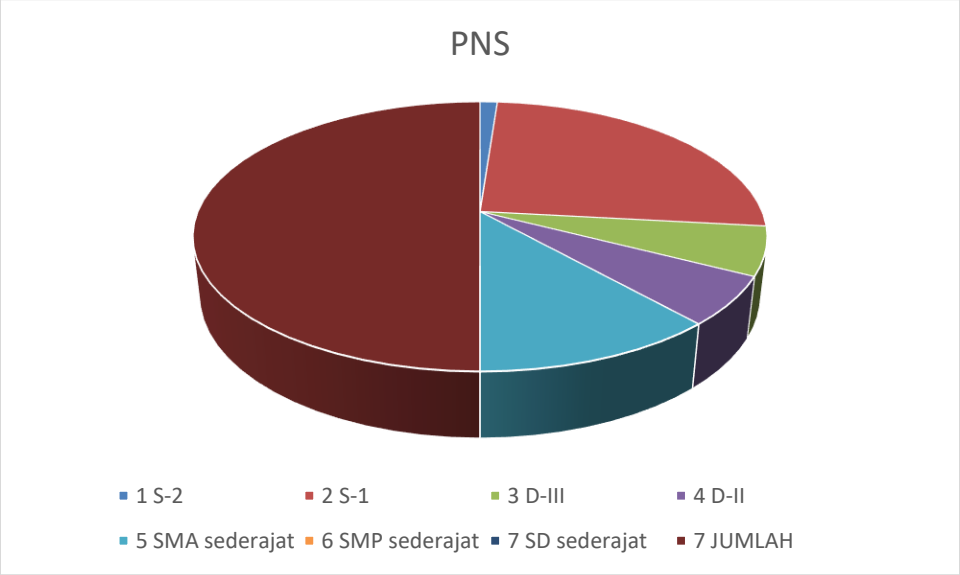

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Perhubungan dilengkapi dengan sarana dan prasarana aset

operasional yang terkait langsung dengan kegiatan, disamping tanah dan gedung bangunan ada asset yang sangat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun jumlah asset yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.1

Asset Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	4 Unit	
2	Kendaraan Roda 2	4 Unit	
3	Meja	37 Buah	
4	Lemari	9 Unit	
5	Lap Top	14 Unit	
6	Komputer	3 Unit	
7	Printer	9 Unit	
8	Kursi	76 Buah	

Untuk mewujudkan pemerintahan yang " Good Govermence" maka fungsi pelayanan dituntut untuk ditingkatkan kualitas nya secara terus menerus sebagaimana diamanatkan dalam UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar juga dihadapkan pada persoalan utama (strategic issued) ;

1. Masih terbatasnya tenaga pelayanan untuk pengamanan lalu lintas dan angkutan
2. Penempatan personil di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar harus yang mempunyai kompetensi dan mampu bekerja secara

profesional dan tidak terkesan pegawai Dinas Perhubungan Pegawai Buangan.

3. Keterbatasan anggaran, sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar belum bisa secara optimal melaksanakan pelayanan.
4. Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi antara lain ; Transportasi , Halte , Rambu, Marka jalan, Guard Raill, Traffic Light , dan belum adanya ATCS di kabupaten Tanah Datar.
5. Kesejahteraan aparat Pegawai di Dinas Perhubungan berupa pemberian Tunjangan Khusus dan penghargaan atas resiko dalam melaksanakan tugas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat amanah untuk melaksanakan SPM dari Kementerian Perhubungan. Khusus di Daerah Kabupaten Tanah Datar, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan baru 1 (satu) Pelayanan Dasar yaitu Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena untuk Pelayanan Pelayaran, Penerbangan dan Kereta Api belum ada potensi yang dimiliki daerah sampai saat ini, untuk digunakan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan untuk kedepan hal ini akan dapat dilaksanakan sejalan dengan perkembangan transportasi di Indonesia

B. PERAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada RPJMD 2021-2026, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".** Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 6 misi dan 10 agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan

perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.

3. Meningkatkan sumberdaya yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 6 ini yaitu peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas.

10 (Sepuluh) Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun
2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah
3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi
4. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten
5. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar
6. Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
7. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan
8. Membangun jaringan telekomunikasi

9. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
10. Perbaikan irigasi

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2015, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang dilengkapi dengan matriks tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah yang dibagi pertahun selama periode renstra, bab ini juga berisi prioritas daerah, perjanjian kinerja dan rencana kerja beserta anggaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi uraian capaian indikator kinerja organisasi tahun 2023. Selain itu disajikan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KENYAMANAN TRANSPORTASI DI KABUPATEN TANAH DATAR “

Penjelasan dari Visi :

Terwujudnya kenyamanan transportasi adalah rasa aman dan tenteram yang dirasakan pengendara dan penumpang angkutan umum baik dalam pelayanan maupun dalam saat dikendaraan.

Berdasarkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan 3 Misi yang akan dicapai pada tahun 2021 – 2026.

Misi, yang telah dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mencapai misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tahun 2021 – 2026, seperti pada tabel 2.B.1

Tabel 2.B.1 Tujuan dan sasaran strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	Strategi
1.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas
		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Meningkatnya kendaraan yang laik jalan
			Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja OPD
		Terwujudnya inovasi	Inovasi yang

		berkelanjutan	dikembangkan dan diterapkan

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dan target tertentu. Tujuan merupakan pernyataan visi yang dijabarkan dalam misi organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan, sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan Adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dan keberhasilan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dan sasaran stratejik yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahunan) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Penyediaan alat kelengkapan jalan	66.25	71,71	71.74	71.76	71.78	71.80

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase kendaraan yang layak jalan	66,25	94,60	95,00	95,50	96,00	96,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (86,00)	Baik (95,00)	Sangat baik (95,20)	Sangat baik (95,40)	Sangat baik (95,60)	Sangat baik (95,80)
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	Predikat akuntabilitas kinerja OPD	BB (70)	BB (71)	BB (72,50)	BB (72)	BB (72,50	BB (73)
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1	1	1	1

3. Sasaran dan Program

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, Dinas Perhubungan menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.C.1

Tabel 2.C.1 Program Dinas Perhubungan Kab. TD berdasarkan sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota Subkegiatan: a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan

		LLAJ Kab/Kota 2. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan: a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Subkegiatan: a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Subkegiatan: a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 4. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 5. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Subkegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.	Meningkatnya tata Kelola	➢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	birokrasi yang akuntabel	Kabupaten/Kota 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya. b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan: a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Kegiatan:

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah , Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan.

Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut dapat tergambar dalam tabel 2.D.1

Tabel 2.D.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
1.	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	71,74 %
2.		Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	100%
3.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel	BB (72,50)
4.		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	1

B. Prioritas Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar mendukung misi 6 ini yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kab.Tanah Datar dalam upaya mewujudkan 10 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah bersinergi/menjadi pendukung dalam mensukseskan agenda dengan cara antara lain :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan demi terwujudnya kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas
2. Peningkatan Kelancaran berlalu lintas berupa pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada area titik keramaian.
3. Peningkatan pelayanan di bidang perhubungan yang berkaitan dengan 10 agenda prioritas pembangunan daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

No	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Realisasi Saat Ini/Capaian Tahun Sebelumnya	Target	Kenaikan
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	71,53 %	71,53 %	0,21
2.	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	104,58%	75%	29,58
		2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Baik	0,48

			(95,68)	(95,20)	
3.	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang akuntabel	Predikat akuntabiltas kinerja OPD	B (66,51)	BB (72,50)	5,99
4	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	-	1	1

Pada tahun 2023 untuk target Pengukuran Kinerja mengalami perubahan dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 15.248.966.718,- menjadi Rp 18.824.578.939,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran seudah Perubahan (Rp)
1.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**10.379.174.218**	**13.688.444.691**
	a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.	320.000.000	282.972.935
	b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.266.293.218	12.886.414.243
	c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	80.000.000	71.855.800
	d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.	345.366.000	355.125.300
	e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	321.000.000	304.144.500
	f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21.000.000	7.909.500
2.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.869.792.50**	**4.897.453.121**
	a. Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000

	b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.500.000	73.430.500
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.500.000	118.459.982
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.000.000	82.000.000
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri	239.164.400	136.164.400
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.164.400	259.164.400

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis, dengan telah ditetapkan rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023. Untuk mendukung kegiatan program pembangunan rencana kerja telah dialokasikan pembiayaan melalui rencana kerja dan anggaran Tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungannya masing-masing.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Datar, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja , anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis masing-masing Satuan kerja perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah menyusun penetapan kinerja sebagaimana tercantum dalam Laporan Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti pada tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Rencana Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)
	URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERHUBUNGAN		**15.248.966.716**
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**4.869.792.500**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**15.000.000**
1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA Induk dan DPA perubahan Dishub	10.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP Dishub	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**4.029.463.700**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan 45 orang ASN Dishub	4.019.463.700
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan semester dan akhir tahun keuangan dan	10.000.000

		asset	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**97.500.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas lapangan 56 pcs	40.000.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Latsar 5 org CPNS, 1 org Diklat PPNS	57.500.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**114.500.000**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat listrik kantor dalam 1 tahun	4.500.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dalam 1 tahun	21.000.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedinya barang cetakan dan penggandaan dalam 1 tahun	11.500.000
4	Penyediaan bahan-bahan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya 2 jenis surat kabar harian dan 2 jenis surat kabar mingguan	6.000.000
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu dalam 12 bulan	11.500.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan	60.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**110.000.00**
1	Pengadaan Mebel	Tersedianya 2 unit kursi pimpinan dan 2	40.000.000

		unit kursi ruang tunggu pelayanan PKB	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya 2 unit AC	20.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**239.164.400**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan gaji THL Adm 2 orang	43.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan air, telepon dan listrik 1 tahun,	160.000.000
3	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Penyediaan alat kebersihan dan gaji THL 1 orang	36.164.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**264.164.400**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan 4 mobil dinas, 1 bus, 4 kendaraan roda 2 dan pembayaran pajak kendaraan	215.000.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan kerja kantor	19.000.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor dan gaji 1 org THL keamanan	30.164.400
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ		**10.379.174.218**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota		**320.000.000**

1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen survei Fasilitas keselamatan	50.000.000
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Sosialiasi keselamatan 2 lokasi	20.000.000
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksannya Pengaturan Rutin Lalin 12 bulan, PAM Agenda Pemerintah Daerah, Operasi Ketupat dan Nataru	250.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		**9.266.293.218**
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Marka Jalan 178 m, Pengadaan PJU 4 paket, Pengadaan RRPJ 6 unit sesuai dengan aturan yang berlaku	200.000.000
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Rambu 32 unit, Trafficlight 6 unit, Warning light 3 unit, PJU 549 unit, gaji THL 2 PJU 2 orang Tagihan Listrik PJU 1 tahun	378.000.000
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		**80.000.000**
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya pemeliharaan 1 unit terminal (jati), tersedianya gaji 2 orang THL K3 Terminal	80.000.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangun Fasilitas Parkir		**345.366.000**

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan gaji THL juru parkir 15 orang	345.366.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		**321.000.000**
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan PKB selama 1 tahun	256.000.000
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Telaksananya kalibrasi dan Pemeliharaan 13 unit Alat PKB	65.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		**21.000.000**
1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya forum lalu lintas Kabupaten 2 kali	21.000.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah		**25.515.000**
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan orang dan/atau barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan angkutan pedesaan sesuai trayek	25.515.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Penghitungan pencapaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diharapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai instansi di akhir tahun anggaran pada tingkat indikator hasil (outcome). Selanjutnya terhadap capaian kinerja sasaran yang tidak memenuhi target rencana yang telah ditetapkan dilakukan analisa sesuai kondisi makro dan asumsi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang berkompeten terhadap laporan ini dapat memahami secara utuh berbagai kelemahan dan kekuatan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan misinya guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi dan data eksternal berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil yang dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur penghematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan.
2. Tingkat capaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan fomulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil perhitungan formulir PKK dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan serta kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam mengukur nilai capaian Kinerja terhadap masing-masing kinerja kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi setiap indikator kinerja (***in put, out put, dan out come***). Sementara untuk pengukuran kinerja, terutama keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran dan keberhasilan yang dicapai organisasi, digunakan skala pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

INTERVAL NILAI	**KRITERIA PENILAIAN**
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik

55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

Kriteria penilaian di atas, digunakan sebagai standar penilaian tingkat capaian baik indikator kinerja keluaran (***out put***), hasil (***out come***), kegiatan/sasaran maupun kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran Misi V dan VI :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	66,25%	71,71%	**71,74 %**	71,71%	71,53%	**78,38%**	108,24	99,75	**109,25**
2. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	66,25%	94,60%	**75,00 %**	218,03%	104.58 %	**77,15%**	329,10	110,55	**102,86**
3. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (86,00)	Baik Sekali (94,99)	**Baik Sekali (95,20)**	Baik Sekali (94,99)	Baik Sekali (95,68)	**Baik Sekali (95,83)**	110.45	100.72	**100,66**
4. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70.00)	BB (71.00)	**BB (72,50)**	B (66,51)	B (68,80)		95,01	96,90	
5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	-	1	**1**	-	1	**1**	-	100	**100**
Rata- Rata Capaian 2023									

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 ada 3 sasaran strategis yang ingin dicapai melalui pelaksanaan 2 (program) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, 33 (tiga puluh) subkegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp. 18.451.120.819,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).** Setelah dilakukan analisa pencapaian kinerja sasaran secara umum telah dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja fisik rata-rata sebesar 98,53%. Dengan capaian kinerja sebagai berikut (terlampir):

Analisa Capaian Kinerja untuk setiap sasaran strategis dapat di uraikan sebagai berikut:

Capaian kinerja sasaran 1 :

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan	66,25%	71,71%	71,74%	71,71%	71,53%	78,38%	108,24	99,75	109,25

I. Sasaran I: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Ouput dari subkegiatan ini berupa tersedianya Dokumen Fasilitas Keselamatan dengan realisasi keuangan.

2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini berupa Pengadaan Penerangan Jalan Umum sebanyak 38 unit yang merupakan pokir anggota DPRD.

3) Subkegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan alat kelengkapan jalan dengan terpeliharanya rambu lalu lintas sebanyak 55 unit, trafficlight sebanyak 6 unit, warning light sebanyak 3 unit dan Penerangan Jalan Umum sebanyak 792 unit. (terlampir)

b. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Subkegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan 1 unit terminal dan pembayaran 2 orang K3 Terminal.

<u>Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:</u>

1. Persentase Penyediaan Alat kelengkapan Jalan (target kinerja =71,74)

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana terpasang Tahun 2023}}{\text{Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2023}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{435}{555}$$

$$= 78{,}38\ \%$$

Capaian Kinerja : $\frac{78,38}{71,74}$ x 100 = 109,25 %

No	Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Pengadaan							Yang dibutuhkan tahun 2023
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	Jumlah	
1	Pengadaan Rambu-Rambu	271	185	6	-	-	-	-	191	59
2	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	802	92	0	-	-	-	-	92	342
3	Perlengkapan									
	- Trafficone	194	64	0	-	-	-	-	64	60
	- Cermin Cembung	38	23	0	-	-	-	-	23	10
	- Roadbarrier	180	0	0	-	-	-	-	0	50
4	Pembangunan Halte (sarana prasarana pendukung jalan)	26	6	1	-	-	-	-	7	14
5	Penerangan Jalan Umum	320	0	20	38	-	-	-	58	20
	Jumlah		370	27	38	-	-	-	435	555

Realisasi Persentase penyediaan alat kelengkapan jalan pada tahun 2023 sebesar 78,38 % sedangkan pada tahun 2022 sebesar 71,53 % mengalami peningkatan sebesar 6,85 % . Hal ini disebabkan karena adanya anggaran Pokir DPRD yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kaabupaten Tanah Datar untuk penyediaan alat kelengkapan jalan berupa Penerangan Jalan Umum sebanyak 38 unit tersebar di beberapa tempat antara lain:

1. Jorong Pagaruyung Kec. Tanjung Emas
2. Nagari Sumpur, Kec. Batipuh Selatan
3. Nagari Taluak, Kec. Lintau Buo

4. Nagari Andaleh, Nagari Paninjauan dan Nagari Sabu, Kec. X Koto

Untuk itu kiranya tahun 2024 berharap agar Tim TAPD tetap mengalokasikan anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar terkait dengan pemenuhan kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan.

Pada tahun 2023 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mendapat bantuan teknis dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumater Barat berupa:

1. Rambu Jalan Lalu Lintas UK 75 cm x 75 cm sebanyak 55 buah
2. Marka Jalan (Uk 3 x 120 mm thermoplastik) putih sebanyak 723 m²

Kedua jenis item diatas direalisasikan pada lokasi sekitar lapangan Cindua Mato dan Pasar Batusangkar.

Capaian kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan	66,25%	94,60%	**75,00 %**	218,03%	104.58 %	**77,15%**	329,10	110,55	**102,86**
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (86,00)	Baik Sekali (94,99)	**Baik Sekali (95,20)**	Baik Sekali (94,99)	Baik Sekali (95,68)	**Baik Sekali (95,83)**	110.45	100.72	**100,66**

Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
   a. Kegiatan: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1) Subkegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

   Output subkegiatan ini berupa :

   a) penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor untuk melakukan KIR pada kendaraan angkutan umum dan penumpang. Untuk tahun 2023 seksi PKB telah melengkapi alat-alat pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kementerian perhubungan sehingga untuk pelayanan KIR kendaraan dapat tercapai dengan maksimal karena didukung oleh peralatan yang handal dan tim pengguji yang telah terakreditasi.
   b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan sumber pendapatan daerah.

2) Subkegiatan: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor

   Output subkegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan PKB dan Kalibrasi Alat untuk setiap tahunnya wajib dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kab. Tanah Datar dengan menghadirkan tim kalibrasi alat PKB dari Kementerian Perhubungan.

b. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

   1) Subkegiatan: Penetapan kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

      Output subkegiatan ini berupa terlaksananya sosialisasi keselamatan berlalu lintas pada kabupaten

Tanah Datar pada 2 (dua) sekolah yaitu SMA 1 X Koto dan MAN 2 Sumpur.

2) Subkegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Output subkegiatan ini berupa pengaturan lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sehingga terpenuhinya pelayanan pengaturan dan pengamanan agenda pemerintah daerah, pengaturandan pengamanan rutin selama 12 bulan, Operasi Ketupat dan Operasi Nataru (Natal dan Tahun Baru).

a. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

1) Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

Output subkegiatan ini berupa:

a) Terbayarkannya gaji 15 orang (THL) Juru Parkir pada lokasi titik parkir ditepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan pelayanan perparkiran yang tertata dengan baik dan teratur.

b) Sumber penerimaan pendapatan daerah berupa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

b. Kegiatan : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

1) Subkegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

Output subkegiatan ini berupa:

a) pengelolaan terminal yang merupakan salah satu prasarana perhubungan yang terkelola dengan baik.

b) Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Jasa Usaha Terminal.

Sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator Kinerja:

1. Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan (target kinerja = 75,00 %)

$$= \frac{\text{Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2023}}{\text{Jumlah Kendaraan yang wajib Uji (PKB) Tahun 2023}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{5413}{7016}$$

$$= 77{,}15\ \%$$

Capaian Kinerja : $\frac{77{,}15}{75{,}00} \times 100 = 102{,}86\ \%$

Jumlah Kendaraan yang melaksanakan pengujian Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kendaraan
1	Januari	278
2	Februari	629
3	Maret	490
4	April	318
5	Mei	550
6	Juni	460
7	Juli	421
8	Agustus	565
9	September	513
10	Oktober	389
11	November	427
12	Desember	373
	Jumlah	**5413**

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (PKB) Tahun 2023

No	Jenis KBWU	Jumlah KBWU
1	Mobil Penumpang Umum-Oplet	23
2	Mobil Bus Seat 9-16 umum	147
3	Mobil Bus Seat 9-16 tidak umum	5
4	Mobil Bus Seat 17 ke atas Umum	104
5	Mobil Bus Seat 17 ke atas Dinas	8
6	Mobil Barang Pick Up Tidak Umum	2146
7	Mobil Barang Pick Up Dinas	5
8	Mobil Barang- Truck Umum	150
9	Mobil Barang- Truck Tidak Umum	513
10	Mobil Barang- Truck Dinas	4
11	Mobil Barang- Dump Truck Umum	83
12	Mobil Barang- Dump Truck Tidak Umum	145
13	Mobil Tangki	0
14	Mobil Barang- Box Umum	52
15	Mobil Barang- Box Tidak Umum	121
	Jumlah= 2 x Kir dalam 1 tahun	**2x3508 =7016**

Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan tahun 2023 sebesar 102,86 % sedangkan tahun 2022 sebesar 104,58 % mengalami penurunan sebesar 1,72 % Indikator ini menerangkan bahwa penyebab turunnya kendaraan yang telah melakukan KIR pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dikarenakan 3 (tiga) kabupaten/kota tetangga yang sudah membuka kembali Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yaitu:

1. Kota Bukitinggi
2. Kota Solok
3. Kabupaten Solok

Pada tahun ini seksi PKB dalam melakukan Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor selalu memberikan himbauan berupa:

1. Dishub selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembayaran non tunai dan persyaratan pengurusan KIR melalui perangkat nagari dan media lain seperti Radio LPPL Luhak Nan tuo dan spanduk media luar ruangan. Pembayaran biaya KIR tidak menerima uang tunai lagi, pembayaran KIR dapat dilakukan melalui ATM, Mesin EDC, Mobile Banking dan pada agen Bank.
2. Sosialisasi terkait dengan kelengkapan alat secara otomatis dan kecakapan tenaga penguji kepada masyarakat, untuk tidak ragu melakukan KIR kendaraannya 2 kali dalam 1 tahun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Permasalahan:

Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) masih terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Tingkatan level penguji pada seksi PKB baru pada level 3, hal ini diperlukan biaya untuk mengikuti diklat khusus penguji PKB.
2. Tidak adanya penyidik PPNS khusus untuk LLAJ sehingga Dishub Tanah Datar susah untuk mengadakan pemeriksaan di jalan terkait angkutan umum dan barang yang bermasalah atau Over Load Over Dimensi (ODOL), sehingga menjadi salah satu penyebab angka kecelakaan tertinggi.

Solusi :

1. Agar Pemkab Tanah Datar melalui BKPSDM agar mengakomodasi biaya diklat penguji khusus untuk mencapai level 5 pada tahun 2024, sebagai persyaratan untuk mempertahankan akreditasi A. Biaya yang dibutuhkan untuk 1 orang penguji mengikuti diklat selama 1 bulan lebih kurang Rp 50.000.000,00 sedangkan tim penguji PKB berjumlah 5 orang. Saran agar mengirim 1 penguji minimal 1 tiap tahunnya.

2. Untuk PPNS bidang Perhubungan tahun 2023 pemkab Tanah Datar melalui BKPSDM sudah menyediakan anggaran diklat tersebut rencana di adakan pada Bulan Agustus 2023 akan tetapi diklat PPNS tidak jadi terlaksana di karenakan tidak mencukupi kuota peserta sehingga pihak penyelenggara membatalkan diklat , hal ini disebabkan umumnya kabupaten/kota tidak mempunyai anggaran untuk diklat memfasilitasi untuk mengikuti diklat dimaksud dikarenakan defisit anggaran.
3. Sebaiknya Tim TAPD Kab. Tanah Datar untuk Tahun 2024 dapat memfasilitasi diklat yang dimaksud.

2. Indek Kepuasan Masyarakat (target kinerja : Sangat Baik (95,20))

Indek Kepuasan Masyarakat terkait dengan Pelayanan Kendaraan Bermotor (PKB) melalui 150 responden diperoleh penilaian sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai Tertimbang
U1	Persyaratan	98	3.885	0,431
U2	Prosedur	96	3.845	0,427
U3	Waktu Pelayanan	94	3,830	0,425
U4	Biaya/Tarif	96	3.785	0,420
U5	Produk Layanan	91	3,810	0,423
U6	Kompetensi Pelaksana	96	3,805	0,422
U7	Perilaku Pelaksana	94	3,805	0,422
U8	Maklumat Pelayanan	99	3,885	0,431
U9	Penanganan Pengaduan	99	3,885	0,431
	Rata-rata	95,83	3,837	0.426

Capaian Kinerja : $\frac{95,83}{95,20} \times 100 = 100,66\ \%$

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar pada Bulan Juli 2023, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori " Sangat Baik " dengan nilai interval konversi IKM antara 88,31 – 100,00 dengan kategori Sangat Baik (nilai 95,83).

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) sudah selayaknya dilakukan secara terus menerus, secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Dengan capaian ini, pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan capaian ini tidak membuat terlena, namun justru menjadi tantangan untuk mempertahankan dan senantiasa melakukan perbaikan di segala unsur pelayanan.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan beberapa unsure pelayanan yang dinilai kurang walaupun berdasarkan tanggapan responden sudah memiliki nilai mutu pelayanan kategori A dengan kinerja pelayanan "Sangat Baik" serta dalam mengoptimalkan unsur-

unsur pelayanan lainnya, maka perlu diperhatikan dan diperbaiki beberapa unsur pelayanannya.

Dengan berpedoman pada temuan survey ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Beberapa rekomendasi langkah strategis tersebut antara lain:

a. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, komponen ini berkaitan dengan profesionalisme pegawai, yang meliputi sikap, perilaku, keterampilan, kepekaan, kedisiplinan, hal ini dapat ditempuh melalui upaya ;
    1. Menerapkan dan mempedomani pedoman kode etik pegawai dalam rangka memotivasi petugas pelayanan terhadap nilai-nilai/standarisasi mengenai sikap layanan dan disiplin kerja dalam memberikan pelayanan;
    2. Penetapan kebijakan internal terkait pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan.
    3. Mengupayakan pembinaan peningkatan profesionalisme, keterampilan dan kemampuan pegawai secara berkala dan berkelanjutan di instansi terkait.
b. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sistem, mekanisme dan prosedur, komponen ini berkaitan dengan sistem dan prosedur baku dalam mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna layanan, meliputi;

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap layanan yang diselenggarakan (termasuk mekanisme pengaduan terhadap keluhan pelanggan), yang diinformasikan secara terbuka melalui media sosialisasi tertulis ataupun forum pertemuan diberbagai tingkatan masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi dari penyedia layanan.
2. Menerapkan dan mempedomani uraian tugas pegawai untuk meningkatkan aspek kejelasan, tanggungjawab dan kedisiplinan pegawai. Uraian tugas dipasang ditempat yang dapat dilihat oleh pengguna layanan.

c. Diperlukan upaya untuk penguatan aspek sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja unit pelayanan melalui upaya ;
   1. Penataan kembali ruang pelayanan, selain memudahkan pelanggan, langkah ini juga memudahkan petugas mau pun pihak Dinas untuk mensosialisasikan program-program pelayanan dengan lebih komprehensif, termasuk memindahkan maklumat pelayanan di tempat yang mudah terbaca.
   2. Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana pelayanan yang ada. Jika memang membutuhkan, perlu pengadaan peralatan penunjang pelayanan.
   3. Peningkatan kenyamanan lingkungan dengan pemenuhan (kebersihan, keindahan, kesederhanaan, kelayakan, dan keamanan) untuk mendukung kinerja pelayanan.

Permasalahan:

Ruang Pengujian Kendaran Bermotor (PKB) sampai saat ini masih dalam kondisi berlantai semen yang menyebabkan debu tebal

menempel pada ruang uji KIR. Untuk memenuhi pelayanan publik sebaiknya diberi keramik untuk kenyamanan dan kesehatan pemeriksaan pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Untuk tahun anggaran 2024 agar Tim TAPD dapat memfasilitasi Ruang Uji Kir Kendaraan

Inovasi:

Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan kembali memperoleh Predikat Tingkat Kepatuhan Tinggi terhadap Pemenuhan Komponen Standar Pelayanan Publik dengan hasil evaluasi nilai 100.

Dengan adanya IKU dengan Sasaran Strategis :Meningkatnya pelayanan perhubungan darat" Output dari kegiatan ini terdapat besaran Retribusi yang diperoleh pada Dinas Perhubungan. PAD yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Perhubungan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Retribusi	TARGET		REALISASI	
		2022	2023	2022	2023
1.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	400.000.000	540.000.000	434.724.000	543.902.000
2.	Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor	600.000.000	600.000.000	696.538.000	477.583.400
3.	Retribusi Terminal	7.000.000	5.000.000	14.332.000	11.634.000
4	Retribusi Izin Trayek	5.000.000	5.000.000	4.305.000	3.205.000
	Total PAD	**1.012.000.000**	**1.150.000.000**	**1.149.899.000**	**1.036.324.400**

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PAD tahun 2023 sebesar Rp 1.036.324.400 sedangkan PAD tahun 2022 sebesar Rp 1.149.899.000 mengalami penurunan sebesar Rp 113.574.600 (9,87%)

Capaian kinerja sasaran 3:

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(8)	(10)
4. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70.00)	BB (71.00)	**BB (72,50)**	B (66,51)	B (68,80)		95,01	96,90	

Sasaran III: Meningkatnya tata Kelola birokrasi yang akuntabel, telah dapat direalisasikan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Subkegiatan :Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
         Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen perencanaan yaitu DPA induk dan DPA Perubahan pada Dinas Perhubungan.
      2) Sub kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         Output subkegiatan ini berupa tersedianya dokumen LKPJ dan LPPD, LKjIP pada Dinas Perhubungan.
   b. Kegiatan: Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Subkegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         Output subkegiatan ini berupa dokumen pembayaran gaji dan dokumen pembayaran TPP ASN Dinas Perhubungan sebanyak 45 orang.
      2) Subkegiatan: Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output subkegiatan ini berupa dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Semester Dinas Perhubungan realisasi keuangan

c. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Subkegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan Kelengkapannya

   Output subkegiatan ini berupa tersedianya pakaian dinas lapangan ASN Dishub sebanyak 65 stel.

2) Subkegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

   Output subkegiatan ini berupa 5 (lima) orang yang sudah mengikuti Latsar CPNS.

d. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor

   Output subkegiatan ini berupa penyediaan komponen Instalasi/Penerangan Kantor untuk kelancaran tugas sehari-hari.

2) Subkegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Output subkegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, kertas dan cover dengan realisasi keuangan sebesar

3) Subkegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Output subkegiatan ini berupa penyediaan kebutuhan kantor yang perlu dicetak dan seperti Map, blanko, kwitansi amplop dan lain-lain serta penyediaan biaya fotokopi dan jilid.

4) Subkegiatan: Penyediaan bahan-bahan dan Peraturan Perundang-Undangan

   Output subkegiatan ini berupa penyediaan bahan bacaan seperti Koran harian dan mingguan untuk peningkatan SDM Aparatur.

5) Subkegiatan: Fasilitasi kunjungan Tamu

Output subkegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat serta penyediaan makanan dan minuman untuk tamu yang datang ke Dinas perhubungan

6) Subkegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output subkegiatan ini berupa terlakananya perjalanan dinas biasa (dalam propinsi dan luar kabupaten) serta perjalanan dinas dalam kota (dalam kabupaten) serta terealisasinya biaya perjalanan dinas sesuai yang dibutuhkan.

e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Pengadaan Mebel

Output subkegiatan ini adalah berupa belanja modal kursi pimpinan 2 unit dan kursi ruang tunggu pelayanan PKB 2 unit untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

2) Subkegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Output subkegiatan ini berupa belanja modal berupa 1 unit AC pada Bidang Praskes Dinas Perhubungan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output subkegiatan ini berupa terbayarkannya gaji THL tenaga administrasi sebanyak 2 (dua) orang dan tersedianya materai dan biaya pengiriman paket pada Dinas Perhubungan

2) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output subkegiatan ini berupa tersedianya/terbayarkan tagihan listrik, air, telepon, internet tiap bulannya pada Dinas perhubungan

3) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

Output subkegiatan ini berupa tersedianya peralatan kebersihan untuk kebersihan dan kenyamanan kantor serta tersedianya gaji 1 (satu) orang THL tenaga kebersihan pada Kantor Perhubungan.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Subkegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

   Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas yang didukung dengan BBM dan suku cadang kendaraan, terbayarkan pajak kendaraan operasional dinas dan KIR bus Sekolah serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang THL tenaga Supir pada Dinas Perhubungan

2) Subkegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

   Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya kendaraan operasional dinas melalui service kendaraan secara berkala.

3) Subkegiatan :Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

   Output subkegiatan ini berupa terpeliharanya gedung kantor dinas perhubungan (cat kantor dan perbaikan WC) serta terbayarkannya gaji 1 (satu) orang THL tenaga keamanan kantor perhubungan

<u>Sasaran tersebut diukur melalui 1 (satu) indikator Kinerja:</u>

1. Predikat akuntabilitas Kinerja OPD (Target Kinerja : BB(71,00))

No	Indikator	Bobot
1	perencanaan kinerja	
2	pengukuran kinerja	
3	pelaporan kinerja	
4	evaluasi internal	

5	capaian kinerja	
	Jumlah	

Capaian Kinerja : $\frac{.....}{71,00}$ x 100 = ... %

Adapun tujuan evaluasi ini, menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran, dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorentasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target Predikat Akuntabilitas OPD tahun 2023 adalah BB sedangkan capaian yang diperoleh pada tahun 2022 adalah "B" hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman ASN terkait pemenuhan dokumen penilaian SAKIP. Untuk itu Dinas Perhubungan mengupayakan agar sasaran 3 ini pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan yang ditargetkan

Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian %		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
5. Terwujudnya inovasi berkelanjutan	-	1	1	-	1	1	-	100	100

Sasaran IV: Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan, untuk Program dan Kegiatan yang mendukung tidak ada.

Selanjutnya pada pelaksanaan Inovasi pada Triwulan IV tetap berlanjut. Khusus pada penamaan website www.dishub.tanahdatar.go.id sudah berubah nama menjadi SIMPORTE telah terlaksana. Website SIMPORTE masih terus dilaksanakan pemabaharuannya dan tetap dilaksanakan. Pada 3 bulan kedepan merupakan masa Uji Coba. Hal ini adalah untuk membiasakan masyarakat menggunakan sebuah sistem terpadu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Namun, pengembangan dalam hal media sosial penyampai informasi khusus melalui media digital tetap dilaksanakan dengan baik. Pada triwulan IV tahun 2023 ini masih berkisar tentang Sistem Informasi Dishub Terbuka yang dimotori oleh tim inovasi SIDISKA Dishub Tanah Datar. Pengelolaan, mengoperasionalan, dan memonitor pelaksanaan penyebarluasan informasi seputar kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sehari-hari telah dilaksanakan dengan baik. Informasi dan data disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Pada triwulan IV penyebarluasan informasi secara terbuka ditambah lagi dengan memanfaatkan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, LPP RADIO LUHAK NAN TUO 102.5 FM yaitu dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat atau ILM seputar Peraturan Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta himbauan Pimpinan Daerah terkait Transportasi berkeselamatan. Sehingga tidak hanya terbuka secara digital di Media Sosial atau media online. Namun media online tetap dipertahankan yaitu sebagai berikut:

- Website: www.dishub.tanahdatar.go.id
- Instagram: Pe_Moda dinasperhubungan
- Facebook: Pe_Moda dinasperhubungan.

Pada triwulan IV ini, seluruh administrasi untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dipersiapkan dengan baik sebelumnya berupa Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Anggota Tim pelaksana SIDISKA. Kemudian rapat-rapat tim berupa pembahasan poin-poin rencana konten yang akan diupload, dan pembagian tugas masing masing petugas yang harus kreatif dan inovatif tetap dilaksanakan.

Inovasi terakhir pada bulan Desember 2023 adalah saat pelaksanaan tugas di lapangan untuk PAM atau Pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Terdapat 5 (lima) buah pos PAM Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yaitu:

1. Pos Lapangan Cindua Mato
2. Pos Depan Pasar Bertingkat
3. Pos Lembah Anai
4. Pos Koto Baru X Koto
5. Pos Tanjung Mutiara

Untuk mendukung Sidiska Pangadu berperan di masyarakat maka Tim Kreatif SIDISKA PANGADU membuat inovasi dengan upload Laporan berita terkini terkait situasi dan kondisi laporan pandangan mata lalu lintas di masing masing pos pos pengamanan. Laporan tersebut langsung disebarluaskan kepada masyarakat. Pembaharuan yang selalu dibuat ini akan terus dilanjutkan pada tahun 2024.

Pelaksanaan SIMPORTE akan tetap diusahakan dengan bekerjasama dengan Tim dari Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024, diharapkan dapat berlanjut dengan sistem pelaporan yang lebih user-friendly, sehingga tidak “ribet”, karena Pengaduan merupakan hal

yang harus ditangani secepatnya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya seketika.

Sasaran 4

Target : 1 inovasi Si-Diska (Sistem Informasi Dishub Terbuka)

Realisasi : 1 Inovasi

Capaian Kinerja : $\frac{1}{1}$ x 100 = 100 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN/REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Program Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Rp	Realisasai Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	➢ Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	**13.484.518.743**	**12.809.004.841**	**94,99**
		1. Kegiatan: Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota Subkegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	50.000.000	49.772.400	99,54
		2. Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Subkegiatan:			
		a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota	37.212.900	33.947.300	91,22
		b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	476.248.700	468.553.272	98,40
		c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12.372.952.643	12.187.236.069	98,40
		3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	71.855.800	69.495.800	96,72
II	Meningkatnya pelayanan Perhubungan Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	**964.098.535**	**927.586.150**	**96,21**
		1. Kegiatan: Pengujian kendaraan Bermotor Subkegiatan: a. Penyediaan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	249.144.500	237.388.250	95,28
		b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	55.000.000	54.963.500	99,93
		2. Kegiatan:			

		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Subkegiatan: a. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota b. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 3. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Subkegiatan: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 4. Kegiatan: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Subkegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	9.418.600 223.554.335 71.855.800 355.125.300	9.360.200 208.284.400 69.495.800 348.094.000	99,38 93,17 96,72 98,02
III	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	**4.897.353.121** 10.000.000 5.000.000 4.203.233.839 10.000.000 40.000.000 33.430.500 4.500.000	**4.770.552.328** 9.971.300 4.968.600 4.138.346.606 9.992.700 36.400.000 18.035.000 4.376.500	**97,41** 99,71 99.37 98,45 99,93 91.00 53,95 97,26

		Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan e. Fasilitasi Kunjungan Tamu f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Subkegiatan: a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Subkegiatan: a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.560.100 11.756.900 6.000.000 11.500.000 22.000.000 10.000.000 50.000.000 43.000.000 60.000.000 36.164.400 215.000.000 14.000.000 30.164.400	18.489.400 9.250.400 6.000.000 8.462.700 21.050.000 9.450.000 49.740.929 42.902.800 48.526.902 29.494.400 198.518.200 11.350.000 30.064.400	99,62 78,68 100 73,59 95,68 94,50 99,48 99,77 80,88 88,93 92,33 81.07 99,67
4.	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	-	-	-	-
		Jumlah	**18.824.578.939**	**18.451.120.819**	**98,53**

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 telah dimaanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahun 2022 anggaran belanja sebesar Rp 18.039.376.745,-,- sedangkan di tahun 2022

sebesar Rp 18.824.578.939 - terjadi peningkatan anggaran sebesar 4,17 % dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan untuk kegiatan di sektor perhubungan.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun sebagai satu kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perhubungan telah menyelesaikan LKjIP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi, tujuan dan sasaran strategis dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar telah dapat berjalan dengan baik.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. LKjIP tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tahun 2021 – 2026.

B. SARAN

1. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) diharapkan masing-masing Bidang dapat mempedomani dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026.
2. Untuk masa akan datang koordinasi dengan tim teknis perlu ditingkatkan.